

## SUMMARY

Andi Satria Ramadhan, Faculty of Administrative Science University of Brawijaya Malang, June 2015, THE EFFORTS OF PAMONG PRAJA POLICE FORCE IN ORGANIZING STREET VENDORS (PKL) TOWARD S THE BEAUTY AND THE ORDERLY OF MOJOKERTO CITY (STUDY IN PAMONG PRAJA POLICE FORCE'S OFFICE OF MOJOKERTO CITY), Dr. Imam Hardjanto, MAP. , Farida Nurani, S. Sos, M. Si.

This undergraduate thesis, writers lift the problem about the effort of Pamong Praja Police Force in Management and Supervision of Street Vendors. Background about that title because increasing the presence of the informal sector like street vendors is feared to add to the problem in urban areas, because its existence is considered to be creating chaos, traffic congestion, and interfere with the cleanliness and the physical attraction of the city. Based on the above explanation, the formulations of problem in this research are: (1) How are the efforts of the Police Force in Organizing street vendors in Mojokerto City? (2) What are the factors supporting and hindering the Police Force to Organize street vendors towards beautiful and orderly Mojokerto City?

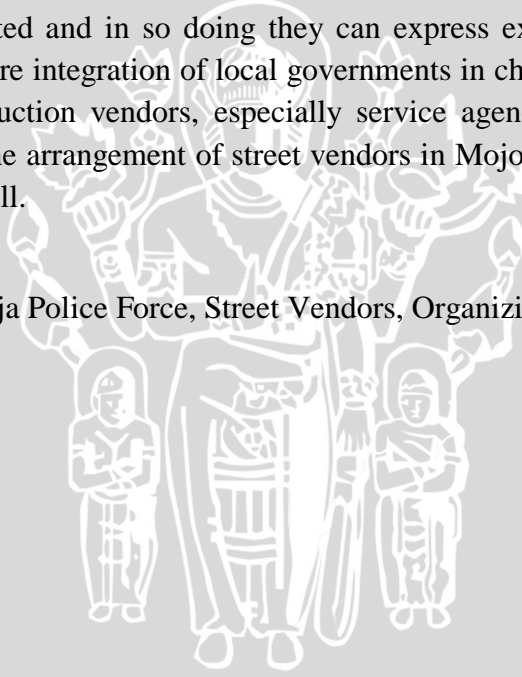
The result about this thesis is empirical research with make juridical sociologis approach. Location of Research in Mojokerto's Town Square and Pamong Praja Police Force's offices work to get the data valid, relevant and accurate. Data used this research is primary data and secondary data. Then that data got analyzed make a descriptive analysis method.

Based on research with that method, many problems are the increasing number of street vendors in Mojokerto makes the city government act to provide new land in accordance with the arrangement of the city, thus minimizing the street vendors who were on the streets as public places, sidewalks, playgrounds, and so forth. The location of their activities which cause traffic congestion by providing a ban on street vendors to use public places, public roads, sidewalks, except for the area that has been designated and permitted by the city authorities to maintain order, beauty, security, tranquility and cleanliness of Mojokerto. Time for the activities / trading, make efforts to limit or reduce the density of the locations that are often occupied by street vendors, the times of their activities should be their solution given that the deadline for selling hours of their activities between the hours of 22:00 pm -

23:00 pm. The use of the equipment that are highly recommended equipment like carts that have wheels, due to the nature of these equipment which are mobile or easily moving, so it will be easily transported after selling than using equipment that are often abandoned after finished selling. There is a need for modification or revision of regulation No. 5 of 2005 which regulates the organization and development of street vendors in Mojokerto to be adapted to the conditions of the vendors at this time. So as to create a shared understanding between the meaning of the arrangement of vendors that can support the implementation of the restructuring program vendors set out in the local regulation No. 5 of 2005 on the structuring and development of street vendors in Mojokerto City.

The recommendation about the result is in socializing against street vendors, a personal approach should be made that vendors will later feel that they and their aspirations are appreciated and in so doing they can express exactly what vendors need. For relocation, more integration of local governments in charge of handling the arrangement and construction vendors, especially service agencies that have been appointed to carry out the arrangement of street vendors in Mojokerto, so structuring and coaching can run well.

Key Word : Pamong Praja Police Force, Street Vendors, Organizing



## RINGKASAN

Andi Satria Ramadhan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Juni 2015, UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENATA PEDAGANG KAKI LIMA MENUJU KEINDAHAN DAN KETERTIBAN KOTA MOJOKERTO (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MOJOKERTO), Dr. Imam Hardjanto, MAP. , Farida Nurani, S.Sos, M.Si

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menata dan Mentertibkan Pedagang Kaki Lima. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh meningkatnya permasalahan dalam Sector Informal seperti Pedagang Kaki Lima yang dikhawatirkan akan menambah masalah di perkotaan, karena keberadaannya dianggap menciptakan kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, dan mengganggu kebersihan dan keindahan fisik Kota. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat Rumusan Masalah: (1) Bagaimana Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menata Pedagang Kaki Lima Di Kota Mojokerto? (2) Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menata Pedagang Kaki Lima menuju Keindahan dan Ketertiban Kota Mojokerto?

Penulisan skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah Alun-alun Kota Mojokerto dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto sebagai data pendukung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Kemudian data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan penelitian dengan metode diatas, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima membuat Pemerintah Kota Mojokerto memberikan lahan baru, guna meminimalisir pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas berdagang di tempat umum, pinggir jalan, taman bermain, dan masih banyak lagi. Lokasi yang mereka tempati sangat mengganggu keindahan dan kebersihan Kota Mojokerto. Waktu yang di berikan kepada Pedagang Kaki Lima pada malam hari diatur antara pukul 22:00-23:00. Alat berjualan yang mereka pergunakan disarankan menggunakan alat yang mobile, seperti gerobak yang bisa dipindahkan sehingga tidak mengganggu keindahan kota. Perlu adanya perombakan atau revisi dari adanya perda no 5 tahun 2005 yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto

untuk disesuaikan dengan kondisi para pedagang kaki lima saat ini. serta perlu adanya ketegasan sanksi yang diberikan dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sehingga tidak ada membeda bedakan pedagang satu dengan pedagang lain dan juga perlu adanya sosialisasi tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima kepada pedagang kaki lima. Perlu adanya komunikasi secara langsung terbuka antara pihak pemerintah Kota Mojokerto dan pedagang kaki lima agar mengetahui kelebihan dan kekurangan masing masing pihak. Sehingga dapat menciptakan persamaan persepsi antara arti dari penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sehingga dapat mendukung pelaksanaan program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang tertuang dalam peraturan daerah no 5 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto.

Saran dari kesimpulan tersebut ialah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pendekatan harusnya dilakukan secara personal sehingga pedagang kaki lima merasa dihargai dan menampung aspirasi dari pedagang kaki lima sehingga mereka bisa mengutarakan apa saja sebenarnya yang pedagang kaki lima butuhkan. Lebih terintegrasinya pemerintah daerah yang bertugas dalam penanganan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, khususnya dinas dinas yang sudah ditunjuk untuk melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto, agar penataan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Pengorganisasian